

Peran Pendapatan Nasional dalam Menentukan Prioritas Pembangunan Ekonomi Publik

Amanda Maryuri^{1*}, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155, KM. 15, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani (sebelumnya Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

E-mail: maryuriamanda@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6325>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 May 2026

Revised: 13 May 2026

Accepted: 19 May 2026

Kata Kunci:

Pendapatan Nasional,
Ekonomi Publik,
Pembangunan,
Kebijakan Pemerintah,
Kesejahteraan
Masyarakat.

Keywords:

National Income,
Public Economics,
Development,
Government Policy,
Social Welfare.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendapatan nasional dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi publik. Pendapatan nasional merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kapasitas fiskal suatu negara, sehingga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Namun, efektivitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional, tetapi juga oleh distribusi pendapatan yang merata dan pengelolaan anggaran yang efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi publik, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

This study aims to analyze the role of national income in determining the priorities of public economic development. National income is a key indicator that reflects the level of economic activity and a country's fiscal capacity, making it an essential basis for formulating government policies. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type through a literature review. Data were obtained from various sources such as books, scientific journals, and official reports. The results of the study indicate that national income plays a strategic role in determining the direction and priorities of development, particularly in the sectors of education, health, infrastructure, and poverty alleviation. The higher the national income, the greater the government's capacity to allocate development budgets. However, the effectiveness of development is not only determined by the level of national income but also by equitable income distribution and efficient budget management. In conclusion, national income plays an important role in supporting public economic development, but it must be balanced with appropriate policies so that the benefits of development can be distributed evenly across society.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Amanda Maryuri, et al. (2026), Peran Pendapatan Nasional dalam Menentukan Prioritas Pembangunan Ekonomi Publik, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6325>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam suatu negara karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Setiap pemerintah pasti berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan di berbagai sektor,

seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Salah satu hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara serta kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Dengan melihat pendapatan nasional, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatur pengeluaran negara.

Dalam kenyataannya, pemerintah sering dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, sementara dana yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penentuan skala prioritas agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, permasalahan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kurang meratanya pembangunan, serta pengelolaan anggaran yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam ekonomi publik. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pembangunan tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk memahami bagaimana peran pendapatan nasional dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi publik. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sehingga pembangunan dapat berjalan secara merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder, yaitu dengan memanfaatkan berbagai data yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Sumber data diperoleh dari literatur Ekonomi Publik, buku, jurnal ilmiah yang membahas pajak progresif dan distribusi pendapatan, serta laporan dari lembaga resmi terkait kebijakan fiskal. Data tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana peran pajak progresif dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan melalui mekanisme redistribusi. Pemanfaatan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai teori dan temuan penelitian terdahulu secara lebih luas tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan meninjau, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber guna mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dalam perekonomian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Tingkat pendapatan nasional menggambarkan kemampuan produksi, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Pada negara berkembang, pengelolaan pendapatan nasional yang baik sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kurniawan (2025) menjelaskan bahwa proses transformasi pembangunan ekonomi menuntut negara mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi secara optimal agar pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai indikator pertumbuhan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang.

Hubungan antara pendapatan nasional dan kebijakan fiskal dapat dilihat dari peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat. Penelitian Moedy dan Ling (2024) menunjukkan bahwa percepatan belanja pemerintah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda yang mampu meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat. Selain itu, Wijayati, Sawitri, dan Fajarani (2025) menemukan bahwa konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan memperbesar kapasitas fiskal pemerintah sehingga belanja publik dapat ditingkatkan dan pembangunan ekonomi dapat dipercepat.

Dalam perspektif ekonomi publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan biasanya difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembangunan wilayah. Arifin (2023) menegaskan bahwa pembangunan perdesaan membutuhkan peran aktif pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, serta akses kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk memperluas pembangunan hingga ke daerah tertinggal dan perdesaan.

Selain pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi publik. Riofita (2023) menjelaskan bahwa persepsi terhadap manfaat dan peluang pendidikan ekonomi mempengaruhi kesediaan mahasiswa untuk merekomendasikan bidang tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada sektor pendidikan memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan jangka panjang karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Riofita (2024) menekankan bahwa persepsi peluang dan kontrol risiko berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap inovasi di sektor keuangan, termasuk fintech syariah. Kepercayaan terhadap sistem keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan nasional juga semakin besar.

Temuan tersebut diperkuat oleh Riofita (2026) yang menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi Z memiliki peran penting dalam perkembangan sektor fintech di Indonesia. Minat generasi muda untuk merekomendasikan fintech dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu seperti persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan tingkat kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan meningkatnya partisipasi generasi muda dalam sektor keuangan, potensi peningkatan aktivitas ekonomi nasional juga semakin besar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan nasional.

Meskipun pendapatan nasional memiliki peran strategis dalam pembangunan, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pendapatan, keterbatasan infrastruktur, serta kurang optimalnya pengelolaan anggaran. Kurniawan (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan serta distribusi sumber daya yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional, tetapi juga oleh kualitas kebijakan fiskal dan pemerataan distribusi pendapatan.

Dengan demikian, pendapatan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi publik. Peningkatan pendapatan nasional akan memperluas ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan belanja publik, memperkuat pembangunan sektor prioritas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Namun, keberhasilan pembangunan tetap bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran, pemerataan distribusi pendapatan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dan sistem keuangan yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi publik. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan menentukan alokasi anggaran pembangunan. Peningkatan pendapatan nasional akan memperbesar kapasitas fiskal pemerintah sehingga memungkinkan peningkatan belanja publik dan percepatan pembangunan pada sektor-sektor strategis.

Pendapatan nasional terbukti memiliki hubungan yang erat dengan belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi yang secara simultan berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Melalui peningkatan belanja publik, pemerintah dapat memperkuat pembangunan pada sektor

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan wilayah perdesaan sebagai prioritas utama dalam ekonomi publik.

Selain faktor fiskal, keberhasilan pembangunan ekonomi publik juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tingkat literasi ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap inovasi sektor keuangan dan meningkatnya partisipasi generasi muda dalam ekonomi digital turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Namun demikian, peningkatan pendapatan nasional tidak secara otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, pendapatan nasional berperan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi publik, namun keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas kebijakan fiskal, pemerataan distribusi pendapatan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dan sistem keuangan yang inklusif.

REFERENSI

- Arifin, A. (2023). Pembangunan Perdesaan dari Perspektif Ekonomi Publik. Dalam Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Jejak Pustaka.
- Kurniawan, E. (2025). Transformasi Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Tantangan dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan di Negara Berkembang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 135–144.
- Moedy, B. K., & Ling, M. (2024). Dampak Akselerasi Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 125–140.
- Riofita, H. (2023). Memicu Kesiapan Mahasiswa untuk Merekomendasikan Jurusan Pendidikan Ekonomi. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1), 43–57.
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151.
- Riofita, H. (2026). Triggering Predictor Effect on the Intention of Millennial and Z Generation to Recommend Fintech: An Evidence from Indonesia. *Journal of Asia Business Studies*, 20(1), 97–114.
- Wijayati, D., Sawitri, N. D., & Fajarani, A. A. (2025). Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap PDB di Indonesia: Pendekatan Data Time Series Tahun 1995–2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3486–3495.